

Tarik Mobil Zulfadhli

PONTIANAK - Kendaraan dinas operasional Ketua DPRD Kalimantan Barat periode 2004-2009 sampai saat ini belum dikembalikan kepada pemerintah provinsi. Kendaraan jenis sedan dengan merk Toyota Camry 2400 AT itu masih di tangan Mantan Ketua

• ke halaman 19 kolom 5

“
Sekarang masalah itu masih ditangani Sekretariat DPRD. Kalau tidak sanggup, baru nanti akan ditangani oleh BPKAD

Christianus Lumano



“
Saya tahu mobil itu bukan milik saya. Kalau mau ditarik paksa, saya minta keadilan. Mengapa hanya kepada saya saja yang *ngotot*

Zulfadhli

Tarik Mobil Zulfadhli

Sambungan dari halaman 9

DPRD Kalbar, Zulfadhli: Sekretaris DPRD, Bambang Soerachmat mengatakan, pihaknya sudah berulang kali menyurati yang bersangkutan dan meminta agar mobil tersebut dikembalikan. Bambang juga mengakui bahwa masalah ini menjadi salah satu catatan dalam hasil pemeriksaan Tim Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemprov 2010. Menyikapi hal ini, Sekretaris DPRD sudah menyurati Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kalbar pada 8 September 2011 dan menyampaikan konfirmasi atas temuan BPK dimaksud. Berdasarkan arsip di Sekretariat DPRD, Zulfadhli saat menjabat sebagai Ketua DPRD pernah menyurati pemprov pada 3 September 2009. Dalam surat itu, Zulfadhli menyampaikan permohonan hibah/pinjam pakai kendaraan ini karena merasa masih memerlukan kendaraan tersebut pasca-memangku jabatan Pimpinan DPRD Kalbar.

Namun, permintaan ini ditolak pemprov melalui surat Plt Sekretaris Daerah Kalbar MH Munsin tertanggal 3 April 2010. Dalam surat itu, pemprov menyatakan bahwa dengan berakhirnya masa bakti pimpinan dan anggota DPRD periode 2004-2009, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD maupun kendaraan operasional yang dipinjamkan kepada Anggota DPRD harus dikembalikan kepada pemda cq Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/barang paling lambat satu

bulan sejak tanggal pemberhentian. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 024/3341/SJ. Sebelumnya, Sekretaris DPRD sudah menyurati Zulfadhli pada 1 Oktober 2009 (Nomor 028/369/Set.DPRD-A). Dalam surat ini, Sekretaris DPRD meminta agar yang bersangkutan mengembalikan kendaraan dinas operasional pimpinan DPRD tersebut. Surat pemberitahuan ke-2 dilayangkan pada 29 Oktober 2009 dengan nomor surat 028/490/Set.DPRD-A. Surat terakhir dilayangkan pada 28 April 2010 tentang penarikan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD periode 2004-2009.

Dalam surat ini diterangkan bahwa kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD itu sudah tidak memiliki nomor polisi. Sebab, nomor polisi KB 4, sekarang terdaftar dan dipergunakan atas nama kendaraan Ketua DPRD Kalbar periode 2009-2014. Secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalbar Christianus Lumano membenarkan bahwa masalah ini menjadi salah satu catatan dalam pemeriksaan BPK. "Sekarang masalah itu masih ditangani oleh SKPD yaitu Sekretariat DPRD. Kalau tidak sanggup, baru nanti akan ditangani oleh BPKAD," katanya. Ketika dikonfirmasi, Mantan Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli menyebutkan, persoalan mobil dinas ini sudah berlangsung lama. Zulfadhli juga mengakui bahwa pemprov melalui sekretaris daerah pernah menyurati dirinya dan meminta mobil tersebut dikembalikan. "Tetapi saya sebelumnya sudah menyurati pemprov

memohon peminjaman mobil itu. Suratnya resmi lho," ujarnya. Menurut Zulfadhli, mobil tersebut masih diperlukannya untuk mendukung tugas-tugas karena dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR yang mewakili Kalbar. Mobil itu digunakan saat kunjungan lapangan ke daerah-daerah di Kalbar ketika masa reses. "Apa itu salah? Saya mewakili masyarakat Kalbar juga. Kecuali kalau saya tidak lagi bertugas untuk kepentingan Kalbar," katanya.

Ia meminta pemprov dapat mempertimbangkan kembali permohonan pinjam pakai yang pernah disampaikan sebelumnya. Dalam hal ini, pemprov juga diharapkan bersikap bijaksana dan dapat memberi kesempatan kepadanya untuk memakai mobil itu. "Saya tahu mobil itu bukan milik saya. Itu aset pemprov. Tetapi apakah pemprov sudah perlu benar dengan mobil itu, sehingga tanpa mobil itu pelayanan publik jadi terganggu? Bukankah pimpinan DPRD sekarang masing-masing sudah punya mobil? Kalau memang pemprov perlu benar untuk pelayanan publik, dan ngotot ingin menariknya secara paksa, saya akan kembalikan," ujarnya.

Hanya saja, jika memang akan ada upaya penarikan paksa, Zulfadhli meminta agar pemprov dapat berlaku adil. Sebab, selama ini ia melihat banyak kendaraan dan aset pemprov lain yang masih dikuasai oleh mantan-pejabat (belum dikembalikan). "Kalau mau ditarik paksa, saya minta keadilan. Mengapa hanya kepada saya saja yang ngotot," pungkasnya. (ron)